

# Merumuskan Ulang E-Demokrasi: Mewaspada Raksasa Digital Global

Sofah D. Aristiawan

Lebih dari satu dekade terakhir ini rutin kita mendengar sejumlah istilah seperti *e-procurement*, *e-contracting*, *e-budgeting*, *e-settlement*, *e-service*, *e-voting*, *e-public*, bahkan *e-ktp*. Berbagai istilah teknis tersebut merupakan implikasi dari kehadiran teknologi digital dalam berbagai sektor kehidupan. Termasuk dalam upaya transformasi penyelenggaraan negara berbasis *e-government* dan *e-governance* dalam proyek global bernama e-demokrasi. Proyek digitalisasi demokrasi dipandang mampu membawa perubahan dalam proses politik yang selama ini cenderung bersifat elitis. Artinya, e-demokrasi dapat meruntuhkan piramida sosial-politik dengan memberi akses yang mudah bagi warga negara biasa untuk bisa berpartisipasi politik nyaris tanpa ada lagi hambatan ekonomi dan sosial.

Demokrasi digital atau e-demokrasi merupakan sebuah proyek modernisasi yang melibatkan visi teknokratik. Namun, pada saat yang sama, proyek dan visi e-demokrasi tersebut menyiratkan satu pertanyaan penting setidaknya bagi para sarjana ilmu politik: dalam rangka pemaksimalan pemanfaatan teknologi digital, bagaimana kekuasaan terdistribusi dalam era demokrasi digital? Lebih teknis, apakah benar watak e-demokrasi terbentuk secara organik tanpa tersentuh kepentingan penyedia platform digital?

## Mewaspada “The Frightful Five”

Sederhananya, demokrasi digital adalah, meminjam pengertian Hacker & van Dijk, serangkaian usaha mempraktikkan demokrasi tanpa batas waktu, ruang, dan keadaan fisik lain, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ITK) dan komunikasi yang dimediasi komputer (KMK), sebagai tambahan praktik-praktik “analog” tradisional. Artinya, berbekal kemajuan ITK, seperti telah dikemukakan di muka, e-demokrasi memuat agenda luhur karena menjanjikan perbaikan: kesetaraan warga negara. Namun, di dalam tugas mulianya itu, e-demokrasi juga mengandung sejumlah persoalan.

*Pertama*, proyek global e-demokrasi cenderung melihat perusahaan raksasa penyedia platform digital sebagai entitas yang netral. Cara pandang seperti itu artinya mengabaikan posisi para raksasa teknologi digital sebagai satu kekuatan baru yang ikut berkontestasi, bahkan besar kemungkinan dapat membelokkan proses politik yang demokratis. Atau seminimalnya, e-demokrasi diwujudkan dalam watak yang tidak bertabrakan dengan kepentingan bisnis mereka.

*Kedua*, demokrasi digital sebetulnya masih berpijak pada konsepsi lama tentang *nation-state* atau negara-bangsa sebagai unit tunggal dalam politik. Padahal, batas teritorial negara-bangsa kian memudar di era digital dan bersamaan dengan itu pula kedaulatan para raksasa digital yang beroperasi secara global melampaui batas-batas fisik konvensional negara menemukan

kedaulatan baru yang menyejajari bahkan menyaingi kedaulatan sebuah negara. Artinya, negara kini bukan lagi satu-satunya aktor terpenting dalam lanskap digital yang mengglobal.

Skeptisisme semacam itu membuat Farhad Manjoo, kolumnis *The New York Times*, menyebut para raksasa teknologi digital sebagai “*the frightful five*.” Yakni: *Alphabet (Google)*, *Amazon*, *Apple*, *Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp)*, dan *Microsoft*. Bagaimana tidak, kita ambil satu fakta paling menarik terkait kecemasan tersebut, bahwa wilayah yang selama ini kerap jadi monopoli negara kini dimasuki pula oleh raksasa digital: pertahanan dan keamanan.

*Microsoft*, misalnya, melalui Brad Smith, *CEO Microsoft*, dalam Konferensi RSA pada 2017 lalu mengatakan adanya mode perang baru, yaitu perang siber mengubah peta permainan tentang isu keamanan dan *Microsoft* menyatakan kesiapannya dalam menghadapi serangan siber. “*Instead of nation-states cyberattacks being met by responses from other nation-states, they’re being met by us.*” *Google* tak ketinggalan: melalui *Maven Project*, program kerja sama dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat, *Google* merancang pelibatan teknologi *artificial intelligence* ke medan pertempuran aktif.

Selain soal pengambilalihan fungsi pokok negara, yang penting lainnya adalah kenyataan bahwa semua perusahaan raksasa teknologi melakukan praktik bisnis antikompetisi. *Apple*, *Google*, dan *Facebook* diselidiki karena dugaan melanggar *Digital Market Act (DMA)* Uni Eropa. *Google* mendominasi industri mesin pencarian internet dan bisnis iklan digital melalui mesin pencari, juga melalui anak perusahaannya: *YouTube*. *Facebook* berhadapan dengan gugatan monopoli platform media sosial dan menutup celah kompetisi dengan membeli *start-up* kompetitor potensial seperti *Instagram* dan *WhatsApp*. Tak jauh beda, *Amazon* juga demikian, digugat terutama terkait dominasinya dalam *e-commerce* di Amerika Serikat. Artinya, berbagai kerepotan dalam upaya mengelola dan meregulasi para raksasa digital, baik di tingkat global maupun di tingkat domestik tiap-tiap negara, mengindikasikan besarnya kekuatan mereka.

Pada intinya, para raksasa digital bukanlah penyedia platform digital semata, mereka juga adalah aktor yang memiliki kepentingannya sendiri, setidaknya kepentingan bisnis. Bisnis mereka menjadi tak hanya terbatas di ranah platform digital yang telah mereka monopoli, tetapi merambah ke berbagai sektor termasuk dalam urusan keamanan dan pertahanan. Ekspansi bisnis tersebut, terutama strategi bisnis monopolinya menjadikan mereka konglomerasi yang memiliki kekuatan nyaris seperti negara, yang pada gilirannya, berbekal *big data* yang mereka kuasai, bisa saja menggeser peran negara sebagai unit terpenting dalam politik di masa depan yang dapat menentukan arah demokrasi.

Dengan melihat realita tersebut, menjadi amat perlu dan mendesak menempatkan diskusi dan aplikasi tentang demokrasi digital dalam isu betapa pentingnya redistribusi kekuasaan di era digital. Termasuk memastikan watak e-demokrasi tampil secara organik dengan, antara lain, memastikan kebijakan mereka seperti *community standards (Facebook)* atau *community guidelines (Twitter atau X dan YouTube)* tidak dipakai sebagai alat memberangus kebebasan berekspresi ketika sebuah konten terang berseberangan dengan kepentingan mereka. Tanpa

upaya serius mengatasi problem redistribusi kekuasaan tersebut dengan cara menjinakkan para raksasa teknologi, proyek global e-demokrasi tak lebih dari sekadar proyek teknis-teknokratik, bukan proyek demokratisasi.